



KORAN	HAL
Haluan	
Padang Ekspres	
Singalang	
Pos Metro	18

Tanggal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Bulan

1 2 3 4 5 6 7



MENERIMA LHP-- Gubernur Sumbar Mahyeldi bersama Ketua DPRD Sumbar Supardi menerima LHP Kinerja dan PDTT Kepatuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dari BPK RI Perwakilan Sumatera Barat.

Gubernur dan Ketua DPRD Sumbar Terima LHP PDTT Kepatuhan Belanja Daerah 2023 dari BPK

PADANG, MTERO
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) meliputi LHP Kepatuhan Belanja Daerah semester II Tahun Anggaran 2023 dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

Penyerahan LHP Kinerja Dan "DTT Kepatuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tersebut bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Sumatera Barat Jl. Khatib Sulaiman Padang. Diberikan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar, Arif Agus kepada Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah dan Ketua DPRD Sumbar Supardi. Selasa, (16/1).

Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar, Arif Agus mengatakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK kepada Pemerintah Daerah dan lembaga terkait merupakan wujud transparansi dan tanggung jawab BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Ini juga bagian dari amanat undang-undang. BPK menyerahkan hasil pemeriksaan kepada DPRD dan kepala daerah sesuai kewenangan yang dimiliki.

Dia juga menyampaikan, terima kasih atas dukungan dan kerjasama sela-

ma proses pemeriksaan. Hasil pemeriksaan diharapkan memberikan manfaat bagi peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Provinsi Sumatera Barat.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengucapkan terimakasih kepada BPK RI Perwakilan Sumbar yang telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik serta berintegritas, independen dan profesional.

"Melalui Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, Pemerintah daerah diharapkan dapat membuat dan melaksanakan perbaikan kebijakan yang tepat sasaran," ungkapnya.

Ketua DPRD Sumbar Supardi, selain menyampai-

kan terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sumbar, dia juga mengatakan bahwa LHP ini tentu akan menjadi petunjuk bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan guna mencapai kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

"Kita menyadari bahwa upaya mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah. Diperlukan sinergi antara BPK RI, DPRD dan Pemerintah daerah,"

Supardi juga berharap sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dan BPK dapat terus ditingkatkan agar mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel.